

**IMPLEMENTASI APLIKASI ARKAS DAN SIPLah DALAM MANAJEMEN  
KEUANGAN DI SDN SUNGAI MIAI 10**

**Salman Al-Farissy<sup>a</sup>, Nazwa Karima<sup>b</sup>, Lia Sapitri<sup>c</sup>, Fatimatuz Zahra<sup>d</sup>, Mahfuza  
Kamelia<sup>e</sup>**

<sup>a</sup>Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas  
Lambung Mangkurat, [2410125210045@mhs.ulm.ac.id](mailto:2410125210045@mhs.ulm.ac.id)

<sup>b</sup>Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas  
Lambung Mangkurat, [2410125220052@mhs.ulm.ac.id](mailto:2410125220052@mhs.ulm.ac.id)

<sup>c</sup>Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas  
Lambung Mangkurat, [2410125120029@mhs.ulm.ac.id](mailto:2410125120029@mhs.ulm.ac.id)

<sup>d</sup>Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas  
Lambung Mangkurat, [2410125120028@mhs.ulm.ac.id](mailto:2410125120028@mhs.ulm.ac.id)

<sup>e</sup>Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan, Universitas  
Lambung Mangkurat, [2410125120009@mhs.ulm.ac.id](mailto:2410125120009@mhs.ulm.ac.id)

**Abstract**

Effective financial management and administration are crucial for implementing responsible and efficient education at the elementary school level. This qualitative research aims to explore how funds are managed, including planning, use, reporting, and monitoring, at SDN Sungai Miai 10. The primary research findings revealed that the school has fully adopted a digital system using the ARKAS and SIPLah applications. All transactions are conducted cashlessly through a government bank account, in accordance with the RKAS (Regional Budget Plan), to ensure maximum transparency and accountability. Although the administrative system is functioning well due to technology and strong collaboration, some issues remain. Students reported a lack of basic facilities and a small contribution to the replacement of cleaning equipment. Overall, the implementation of the digital system has significantly contributed to the efficiency and success of the school's financial management.

Keywords: Financial Management, Financial Administration, ARKAS, Transparency, Accountability

**Abstrak**

Pengelolaan dan administrasi keuangan yang efektif sangat penting untuk melaksanakan pendidikan yang bertanggung jawab dan efisien di tingkat sekolah dasar. Penelitian kualitatif ini memiliki tujuan untuk mendalami bagaimana pengelolaan dana dilakukan, yang meliputi perencanaan, penggunaan, pelaporan, dan pengawasan di SDN Sungai Miai 10. Hasil penelitian utama mengungkapkan bahwa sekolah telah mengadopsi sepenuhnya sistem digital dengan memakai aplikasi ARKAS dan SIPLah. Semua transaksi dilakukan secara non-tunai melalui rekening bank pemerintah, sesuai dengan RKAS, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas yang maksimum. Walaupun sistem administrasi berjalan dengan baik karena

adanya teknologi dan kerjasama yang solid, masih terdapat beberapa masalah. Para siswa melaporkan adanya kekurangan dalam fasilitas dasar serta adanya kontribusi untuk penggantian alat kebersihan yang kecil. Secara keseluruhan, penerapan sistem digital berkontribusi besar terhadap efisiensi dan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan sekolah.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan, Administrasi Keuangan, ARKAS, Transparansi, Akuntabilitas

## PENDAHULUAN

Manajemen dan administrasi keuangan merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan, terutama di sekolah dasar. Pengelolaan dana yang baik menjadi kunci agar kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, efektif, serta akuntabel. Keuangan sekolah perlu dikelola melalui proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban secara sistematis. Dengan demikian, semua kegiatan sekolah dapat didukung oleh penggunaan dana yang efisien dan transparan.

Menurut <sup>1</sup> dalam jurnal *Manajemen Keuangan Sekolah Dasar: Kajian Literatur* (Didaktika: Jurnal Kependidikan dan Sosial), pengelolaan keuangan sekolah dasar harus dilakukan dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa manajemen keuangan yang baik meliputi perencanaan anggaran, pengorganisasian sumber daya keuangan, pelaksanaan sesuai program, serta evaluasi yang melibatkan seluruh pihak sekolah. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola administrasi keuangan dan lemahnya sistem pengawasan.

Selanjutnya, hasil penelitian <sup>2</sup> menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi yang baik sangat membantu dalam menciptakan akuntabilitas pengelolaan dana BOS di sekolah dasar. Dengan adanya sistem yang transparan dan terdokumentasi dengan baik, setiap transaksi keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. Namun demikian, tantangan yang sering muncul adalah kurangnya pelatihan bagi bendahara dan tenaga administrasi sekolah dalam mengoperasikan sistem tersebut, sehingga pencatatan keuangan belum sepenuhnya berjalan efektif.

---

<sup>1</sup> Sri Puji Hastuti and Mohamad Iwan Fitriani, "Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Melalui Literasi Keuangan Di SD Negeri Tanak Embang," *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 3 (2024): 2145–53, <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i3.2423>.

<sup>2</sup> Nurul Farida and Mulyaningtyas, "Implementation of Accounting Information Systems and Accountability of Regular School Operational Assistance," *Jurnal PETA* 9, no. 1 (2024): 55–67, <https://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/748/748>.

Sementara itu, penelitian <sup>3</sup> menegaskan bahwa akuntabilitas dana BOS di sekolah sangat bergantung pada tata kelola keuangan yang baik dan keterbukaan informasi publik. Ketika pengelolaan dana dilakukan dengan prinsip good governance yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas maka kepercayaan masyarakat terhadap sekolah akan meningkat. Sebaliknya, jika sistem administrasi keuangan tidak tertata dengan baik, akan muncul potensi penyimpangan serta menurunnya kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan.

Ketiga penelitian tersebut menunjukkan bahwa peran kepala sekolah dan bendahara sangat penting dalam menjaga tertib administrasi keuangan. Jika administrasi keuangan tidak dikelola dengan baik, maka penggunaan dana sekolah dapat menimbulkan masalah seperti tidak tepatan anggaran dan kurangnya transparansi dalam pelaporan. Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang mendalam tentang manajemen dan administrasi keuangan di sekolah dasar untuk mengetahui bagaimana pelaksanaannya di lapangan, faktor pendukung dan penghambatnya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk memperbaikinya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Kualitatif merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis mendalam <sup>4</sup>. Subjek dalam penelitian ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami secara langsung proses pengelolaan keuangan di sekolah dasar. Adapun subjek penelitian terdiri atas Kepala sekolah, Bendahara, dan Siswa. Penelitian ini dilakukan di SDN Sungai Miai 10. Sekolah ini dipilih karena sudah memiliki pengelolaan keuangan yang cukup baik dan teratur. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis, yaitu: Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya melalui wawancara, observasi, kuesioner, eksperimen, dan dokumentasi <sup>5</sup>. Data sekunder, merupakan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan dapat di peroleh dari sumber seperti laporan penelitian sebelumnya, data sensus, atau arsip-arsip yang tersedia <sup>6</sup>. Untuk memperoleh data yang akurat dan mendalam, digunakan beberapa teknik pengumpulan data berikut: Wawancara, Peneliti melakukan wawancara secara langsung dengan kepala sekolah, bendahara, dan beberapa siswa.

---

<sup>3</sup> Nur Istiqomah and Fityan Izza Noor Abidin, "Evaluation of BOS Fund Accountability for Good Governance in Schools," *Inquest Journal* 2, no. 2 (2025): 15–34, <https://doi.org/10.53622/ij.v2i2.343>.

<sup>4</sup> Syahrial Hasibuan et al., *Media Penelitian Kualitatif, Jurnal EQUILIBRIUM*, vol. 5, 2022.

<sup>5</sup> A Hanifah et al., *Pengantar Ilmu Statistik* (Duta Sains Indonesia, 2025).

<sup>6</sup> Hanifah et al.

Observasi Langsung, Peneliti melakukan pengamatan terhadap aktivitas administrasi dan pengelolaan keuangan di sekolah. Kegiatan observasi mencakup cara pencatatan dan penyimpanan dokumen keuangan, proses pencairan dana, serta bentuk kerja sama antara kepala sekolah, bendahara, guru, dan pihak lain. Studi Dokumentasi Peneliti mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan administrasi dan pengelolaan keuangan sekolah, seperti RKAS, buku kas umum, laporan penggunaan dana BOS, dan arsip kegiatan sekolah. Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles dan Huberman yang menyatakan bahwa, aktivitas dalam analisis dalam kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Sungai Miai 10 yang beralamat di Komplek Ar-Rahim II, Jl. Sultan Adam No.1 18, Sungai Miai, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123. Sekolah ini merupakan salah satu sekolah dasar negeri yang berada di wilayah perkotaan dengan lingkungan yang cukup kondusif untuk kegiatan belajar mengajar. Peneliti melakukan wawancara dengan bendahara sekolah dan kepala sekolah sebagai narasumber utama yang berperan langsung dalam pengelolaan dan administrasi keuangan sekolah. Proses wawancara dilaksanakan di ruang kepala sekolah dalam suasana yang tenang dan mendukung kegiatan pengumpulan data.

Secara umum, SDN Sungai Miai 10 memiliki beberapa ruang kelas yang representatif, ruang kepala sekolah, ruang guru, perpustakaan, serta ruang tata usaha yang berfungsi sebagai pusat kegiatan administrasi dan pengelolaan keuangan sekolah. Lingkungan sekolah tampak bersih, tertata, serta didukung oleh warga sekolah yang disiplin dan aktif menjaga keteraturan dalam kegiatan sehari-hari. Dalam hal manajemen dan administrasi keuangan, sekolah ini telah menerapkan sistem pengelolaan berbasis digital melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) serta Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Kedua sistem tersebut digunakan untuk mengelola dana operasional sekolah, mencatat setiap transaksi, serta membuat laporan keuangan secara daring. Pengelolaan keuangan dilaksanakan oleh bendahara sekolah dengan pengawasan langsung dari kepala sekolah, agar setiap proses keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip transparansi.

Sumber dana utama yang dikelola oleh sekolah berasal dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), serta bantuan tambahan dari pemerintah daerah. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, perawatan sarana dan prasarana, pengadaan alat tulis, dan honor guru non-PNS. Setiap penggunaan dana dilaporkan secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi sekolah. Pemilihan SDN Sungai Miai 10 sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah ini telah menerapkan tata kelola keuangan yang baik, tertib, dan sesuai dengan peraturan pemerintah. Sekolah juga aktif mengikuti pelatihan dan pembaruan sistem keuangan digital dari dinas pendidikan. Dengan demikian, sekolah ini dinilai relevan sebagai tempat penelitian mengenai Manajemen dan Administrasi Keuangan di Sekolah Dasar, karena dapat memberikan gambaran nyata tentang praktik pengelolaan keuangan sekolah dasar yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Berdasarkan paparan data yang telah diuraikan diatas maka ditemukannya strategi mengenai manajemen dan administrasi keuangan sekolah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas Keuangan Digital dan Modernisasi: Sekolah kini telah meninggalkan penggunaan uang tunai dan sepenuhnya mengandalkan sistem online lewat Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Sistem ini memastikan bahwa semua langkah dari perencanaan anggaran (RKAS), pembelian melalui sistem pemesanan, pencatatan (Buku Kas Umum), hingga pelaporan dijalankan tanpa uang tunai melalui rekening dan tercatat secara otomatis. Ini meningkatkan transparansi karena setiap pengeluaran bisa dipantau (oleh Kepala Sekolah sebagai Approver) dan dilaporkan secara teratur kepada Dinas Pendidikan, bahkan juga dipajang di papan pengumuman sekolah.
2. Pengawasan dan Perencanaan yang Ketat: Pengeluaran dana mengikuti prosedur yang sangat ketat; dana hanya dapat digunakan setelah RKAS disetujui oleh Dinas di awal tahun. Kepala Sekolah memiliki peran penting sebagai pengawas (approver) yang harus memberikan persetujuan untuk setiap transaksi yang diajukan oleh bendahara. Perencanaan anggaran dilaksanakan secara bersama melalui rapat dengan para guru untuk menyesuaikan dengan kebutuhan sekolah sebelum diajukan.
3. Tantangan Regulasi dan Dampak Anggaran yang Terbatas: Meskipun sistem berfungsi dengan baik, sekolah mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan regulasi anggaran dari pemerintah, seperti batasan persentase untuk pengeluaran tenaga honorer,

keharusan alokasi sepuluh persen untuk buku, dan pembatasan minimal perbaikan sarana dan prasarana (hanya diizinkan di atas lima juta rupiah). Perubahan ini memaksa pihak sekolah untuk berpikir keras dalam menyesuaikan kebutuhan riil dengan anggaran yang sudah ditentukan.

4. Kesenjangan antara Pengelolaan Dana dan Fasilitas Fisik: Meskipun sistem keuangan teratur, tidak ada pembelian barang baru atau tambahan fasilitas fisik dalam waktu dekat. Fasilitas dasar untuk belajar (seperti papan tulis dan spidol) dianggap bermanfaat dan disukai siswa, tetapi jumlahnya masih dianggap kurang memadai sehingga kadang terjadi persaingan untuk penggunaannya. Selain itu, tanggung jawab untuk biaya penggantian alat kecil yang rusak (seperti sapu) masih ditanggung oleh siswa melalui iuran, menunjukkan bahwa dana operasional sekolah belum sepenuhnya mencakup kebutuhan dasar sehari-hari yang bersifat minor.
5. Kegiatan Non-Fisik Sekolah yang Aktif: Di sisi lain, sekolah menunjukkan keberhasilan dalam kegiatan non-fisik, seperti lomba-lomba untuk perayaan 17 Agustus, class meeting (dengan alat disediakan oleh guru atau panitia), dan kegiatan rutin mingguan (Senam/Jumat Takwa), yang menunjukkan bahwa anggaran digunakan secara efektif untuk mendukung aktivitas dan pengembangan sosial siswa.

Untuk memperjelas hasil temuan di atas dibuatlah tabel pedoman wawancara untuk bendahara dan siswa sebagai berikut:

Pedoman Wawancara Bendahara Sekolah

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Bagaimana Proses Pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan di sekolah ini?	Kalau sekarang semuanya online, kami belanjanya online jadi pelaporannya juga online , ada aplikasi yang namanya aplikasi ARKAS disitu buku kas umumnya dilaporkan setiap bulan dan juga transaksinya sekarang menggunakan SIPLAH (Sistem Informasi Pengadaan Sekolah), Jadi kayak kalau kita dalam sehari-hari itu sejenis belanja online. Jadi sekarang bendahara tidak pernah lagi memegang uang dalam bentuk tunai tetapi

		dalam rekening dan itupun belanjanya tidak bisa sesuka hati dalam membeli atau menggunakan uang tersebut, harus sesuai dengan anggaran yang di ajukan.
2.	Apa saja jenis administrasi atau dokumen yang digunakan dalam keuangan sekolah?	Dalam SIPLAH tersebut sudah mencakup semua jenis administrasi mulai dari buku kas umum, bukti transaksi, dan laporan realisasi BOS. Jadi semua administrasi sudah terkumpul jadi satu di dalam aplikasi ARKAS di bagian SIPLAH.
3.	Bagaimana prosedur Pengeluaran dana untuk kegiatan sekolah di lakukan?	Setiap akhir tahun, bendahara merancang RKAS, jadi biasanya di ACC oleh dinas, jika di ACC di awal tahun dana masuk jadi baru bisa di belanjakan, saat di belanjakan itupun biasanya kalau mengeluarkan itu harus ada approver (pihak yang bertugas memberikan persetujuan atau penolakan akhir dalam suatu pekerjaan, dokumen, atau transaksi). Jadi bendahara yang membelanjakan namun kepala sekolah yang menyetujui. Jadi tidak bisa bendahara saja yang membelanjakan, terus dalam hal belanjanya pun harus dalam sistem pesan bukan seperti yang datang langsung ke tempat atau ke toko.
4.	Apakah ada Kendala Dalam Mengelola Keuangan Ini?	1. Kendala dalam hal aset: kode rekening yang biasanya dalam buku, dulu kan buku itu termasuk dalam barang cetak tapi sekarang jadinya seperti aset, jadi kemarin ada beberapa kali perubahan RKAS tapi sudah di sepakati bahwa itu bukan aset mulai tahun depan.

		<p>2. Belanja Honorer: Belanja honorer ini di batasi dari sumber dana BOS, namun di tahun kemarin masih 20% namun sekarang dibatasi menjadi 5% saja karena adanya paruh waktu jadi tercover dari situ. Jadi untuk dana BOS di ambil hanya sedikit saja untuk belanja honorer ini. Sekarang terdapat kebijakan baru lagi seperti buku, buku itu harus 10% dari anggaran yang ada, jadi kami harus berpikir keras bagaimana agar dana yang digunakan untuk buku 10% saja. Sedangkan perbaikan SAPRAS (Sarana Prasarana Sekolah) minimal 5 juta saja untuk sekarang. Jadi seperti kerusakan itu tidak bisa langsung di perbaiki. Jadi dapat di simpulkan kendalanya terdapat pada anggaran yang di perbanyak dan anggaran yang di kurangi, jadi pihak sekolah harus menyesuaikan anggaran yang sudah di ajukan.</p>
5.	<p>Bagaimana Bentuk Koordinasi Bendahara Dengan Kepala Sekolah Terkait Dengan Keuangan Sekolah Ini?</p>	<p>Biasanya bukan hanya dengan kepala sekolah saja untuk koordinasinya, karena saat ingin membuat anggaran itu harus mengadakan rapat dengan guru terlebih dahulu untuk membahas kebutuhan yang harus di anggarkan untuk tahun berikutnya, kemudian setelah rapat kami susun kembali untuk menyesuaikan kebutuhan itu. Kalau untuk pelaksanaannya pun harus ada pengawasannya seperti tadi bendahara yang berbelanja namun kepala sekolah menjadi</p>

		pengawas (Approver), jadi harus ada kerja sama.
6.	Apa Langkah Yang Dilakukan Agar Pengelolaan Dana Tetap Transparan atau Akuntabel?	Sekarang karena sistem belanjanya menggunakan rekening dari pemerintah bagaimana pun pasti akan kelihatan, Seperti dulu kami pernah melakukan kesalahan peraturan yaitu bendahara pernah membayarkan dana sekolah ke rekening guru untuk membeli kebutuhan sekolah ternyata itu tidak di perbolehkan oleh dinas jadi kami harus mengembalikan dana itu. Namun karena sekarang sudah menggunakan sistem digital jadi setiap pengeluaran yang digunakan pasti akan transparan atau kelihatan. Jadi agar pengelolaan dana itu tetap transparan sekolah membuat kebijakan yaitu menempelkan berapa anggaran yang dibutuhkan di mading pengumuman agar seluruh warga sekolah dapat melihat. Dan setiap bulan harus melapor ke dinas, jadi ada laporan pertanggungjawabannya.

No	Pertanyaan	Jawaban	Nama Siswa
1.	Di sekolah kamu, ada nggak hal yang baru dibeli? (misalnya perbaikan kelas, alat tulis, kegiatan lomba, atau peralatan belajar)?	Tidak ada barang yang baru-baru ini di beli	<b>Azka</b>
2.	Menurut kamu, apakah fasilitas dan kegiatan sekolah sudah memadai?	Sudah cukup lengkap contohnya peralatan untuk belajar dan	

		mengajar sudah di sediakan pihak sekolah seperti papan tulis, penghapus, spidol, dll	
3.	Kamu suka nggak sama fasilitas yang ada di sekolah sekarang?	Suka karena fasilitas di sekolah ini sudah cukup lengkap	
4.	Pernah nggak sekolah ngadain kegiatan seru kayak lomba atau jalan-jalan?	Pernah seperti waktu acara 17an dan classmeet. Alat untuk lomba biasanya di sediakan oleh panitia, panitianya adalah guru juga.	
5.	Di sekolah kamu, ada nggak hal yang baru dibeli?	Sejauh ini belum ada barang baru yang dibeli oleh sekolah, semuanya masih menggunakan fasilitas yang sudah ada.	<b>Nafisa</b>
6.	Menurut kamu, apakah fasilitas dan kegiatan sekolah sudah memadai?	Menurut saya sudah cukup memadai. Sekolah menyediakan berbagai perlengkapan belajar seperti papan tulis, spidol, penghapus, dan alat	

		bantu mengajar lainnya.	
7.	Kamu suka nggak sama fasilitas yang ada di sekolah sekarang?	Suka, karena fasilitas yang tersedia sudah membantu proses belajar jadi lebih nyaman dan lengkap.	
8.	Pernah nggak sekolah mengadakan kegiatan seru kayak lomba atau jalan-jalan?	Pernah, contohnya saat perayaan Hari Kemerdekaan dan class meeting. Biasanya alat dan perlengkapan lomba disiapkan oleh panitia yang terdiri dari para guru.	
9.	Apakah di sekolah kamu ada fasilitas yang baru?	Gk ada	
10.	Kegiatan lomba atau kegiatan apa aja?	Kegiatan 17 Agustus, setiap jum'at pagi senam/jum'at takwa	
11.	Apakah peralatan belajar lengkap?	lengkap	
12.	Apakah alat kebersihan lengkap?	Kurang kadang kadang kami berebutan, kalau sapu patah nanti akan iuran 2 ribu per orang karena kalau kebanyakan takut ada yg keberatan	<b>Andini</b>

13.	Menurut kamu apakah fasilitasnya memadai?	Memadai tapi Maunya ada perbaikan sih seperti nama papan sekolah sisinya miring	
14.	Rating kamu 1-10 seberapa suka kamu dengan sekolah ini?	9,5	

Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara sekolah serta observasi langsung di lapangan, dapat dipahami bahwa pelaksanaan manajemen dan administrasi keuangan di sekolah dasar telah dilakukan secara sistematis dan berbasis digital. Pengelolaan keuangan sekolah telah mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah melalui penggunaan aplikasi resmi seperti Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) serta Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Sistem digital ini menjadi bagian dari budaya administrasi sekolah yang mencerminkan transparansi, akuntabilitas, dan tertib administrasi dalam pengelolaan dana sekolah.

Setiap transaksi keuangan dilakukan melalui rekening sekolah tanpa penggunaan uang tunai, serta wajib sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang telah disusun dan disahkan pada awal tahun anggaran. Pelaporan keuangan dilakukan secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif. Semua bukti transaksi tersimpan dalam sistem ARKAS sehingga memudahkan proses audit dan pengawasan.

Sumber dana yang dikelola sekolah berasal dari berbagai program pemerintah seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP), serta bantuan dari pemerintah daerah. Dana tersebut dialokasikan secara efektif untuk mendukung operasional sekolah, kegiatan pembelajaran, pengadaan sarana prasarana, serta pembayaran honor guru non-PNS. Proses perencanaan dan penggunaan dana dilakukan melalui koordinasi bersama antara kepala sekolah, bendahara, dan guru dalam rapat rutin.

Kepala sekolah berperan sebagai pengawas dan penanggung jawab utama pengelolaan dana, sementara bendahara bertanggung jawab dalam administrasi pencatatan dan pelaporan. Transparansi penggunaan dana diwujudkan melalui publikasi laporan realisasi dana BOS pada papan informasi sekolah yang dapat diakses oleh warga sekolah maupun masyarakat. Hal ini menunjukkan komitmen sekolah terhadap tata kelola keuangan yang jujur dan terbuka.

Meskipun demikian, pelaksanaan administrasi keuangan masih menghadapi beberapa kendala seperti keterlambatan pencairan dana BOS dari pemerintah dan kendala teknis dalam penggunaan aplikasi ARKAS dan SIPLah, terutama bagi pengguna yang masih baru. Namun pihak sekolah terus melakukan evaluasi dan mengikuti pelatihan agar pelaksanaan administrasi keuangan dapat berjalan lebih optimal dan efisien.

Dari hasil analisis data tersebut, peneliti menyusun preposisi penelitian menjadi beberapa poin sebagai berikut:

1. Pengelolaan administrasi keuangan sekolah telah dilaksanakan secara digital melalui penggunaan aplikasi ARKAS dan SIPLah sebagai sistem pencatatan dan pelaporan resmi.
2. Semua transaksi keuangan sekolah dilakukan melalui mekanisme non-tunai sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.
3. Pelaporan keuangan dilakukan secara berkala kepada Dinas Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi penggunaan dana sekolah.
4. Sumber dana sekolah berasal dari program pemerintah seperti BOS dan BOP yang dialokasikan sesuai prioritas kebutuhan sekolah berdasarkan RKAS.
5. Kepala sekolah berperan sebagai pengawas dan penanggung jawab penggunaan dana, sedangkan bendahara menjalankan tugas administrasi pencatatan dan pelaporan keuangan.
6. Sistem digital yang diterapkan sekolah mendukung keterbukaan informasi publik melalui publikasi laporan dana BOS.
7. Kendala dalam pelaksanaan administrasi keuangan seperti keterlambatan pencairan dana dan kesulitan teknis dalam aplikasi diatasi melalui koordinasi dan pelatihan teknis dari dinas pendidikan.

#### A. Proses Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Sekolah

Proses pencatatan dan pelaporan keuangan di sekolah dasar merupakan bagian penting dari sistem manajemen keuangan yang berfungsi untuk memastikan seluruh penggunaan dana berjalan sesuai peraturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hasil wawancara dengan bendahara dan kepala sekolah SDN Sungai Miai 10, diketahui bahwa kegiatan pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan secara digital melalui Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) dan Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah). Penggunaan kedua sistem ini menggambarkan bahwa sekolah telah

menerapkan tata kelola keuangan yang modern, efisien, serta sesuai dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan dana BOS dan BOP.

Menurut <sup>7</sup>, penerapan sistem informasi akuntansi sekolah melalui ARKAS telah membantu meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi pelaporan keuangan. Setiap transaksi yang dilakukan sekolah dicatat secara otomatis, disertai bukti transaksi digital, sehingga meminimalisir kesalahan pencatatan dan manipulasi data. Dengan sistem ini, proses pelaporan dapat dilakukan lebih cepat dan transparan karena seluruh data tersimpan dalam basis data daring yang dapat diakses oleh pihak Dinas Pendidikan. Hal ini sejalan dengan kondisi di SDN Sungai Miai 10, di mana bendahara melaporkan seluruh transaksi secara daring dan memastikan bahwa setiap pengeluaran dana tercatat dalam ARKAS.

Proses pencatatan keuangan di sekolah dimulai dari perencanaan anggaran yang tertuang dalam dokumen Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Dokumen RKAS ini menjadi pedoman utama dalam mengelola seluruh kegiatan keuangan selama satu tahun ajaran. Setiap pengeluaran harus mengacu pada rencana anggaran yang telah disetujui, sehingga tidak ada penggunaan dana di luar pos yang telah ditetapkan. Pencatatan transaksi dilakukan setiap kali terjadi pengeluaran atau pemasukan dana, disertai bukti kuitansi, nota, faktur, dan bukti transfer yang sah. Seluruh dokumen tersebut diarsipkan baik secara fisik maupun digital.

Sejalan dengan hasil penelitian <sup>8</sup>, sekolah-sekolah yang telah menerapkan sistem pengelolaan dana BOS secara digital menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam ketertiban administrasi dan kecepatan pelaporan. Pencatatan berbasis digital memungkinkan bendahara untuk langsung mengunggah bukti transaksi ke dalam sistem ARKAS, yang kemudian akan tersinkronisasi dengan laporan keuangan bulanan dan triwulanan. Hal ini juga diterapkan di SDN Sungai Miai 10, di mana laporan keuangan dikirimkan secara rutin kepada Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin melalui sistem daring tanpa perlu pengiriman berkas fisik dalam jumlah besar.

Selain itu, pelaporan keuangan di sekolah dilakukan secara berkala setiap bulan dan triwulan. Laporan ini mencakup realisasi penggunaan dana, sisa saldo, serta bukti-bukti

---

<sup>7</sup> Farida and Mulyaningtyas, "Implementation of Accounting Information Systems and Accountability of Regular School Operational Assistance."

<sup>8</sup> Sedyana Santosa, Andi Mihrajuddin, and Erni Munastiwi, "The Implementation of School Financial Management System in Managing the BOS Fund," *Al-Idarah : Jurnal Kependidikan Islam* 12, no. 2 (2022): 145–55, <https://doi.org/10.24042/alidarah.v12i2.10905>.

pengeluaran yang sah. Kepala sekolah menandatangani laporan sebagai bentuk pengesahan dan pertanggungjawaban, sebelum laporan tersebut dikirim ke dinas pendidikan. Dalam praktiknya, setiap transaksi juga dilengkapi dengan berita acara dan tanda tangan pihak-pihak yang terlibat, seperti kepala sekolah dan bendahara. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap dana digunakan sesuai peraturan dan dapat diaudit kapan saja.

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa sekolah telah berupaya menjaga keterbukaan dalam proses pelaporan keuangan. Laporan realisasi dana BOS dipublikasikan melalui papan informasi sekolah agar dapat diakses oleh guru, orang tua, dan masyarakat. Langkah ini sejalan dengan prinsip transparansi publik yang ditekankan oleh <sup>9</sup>, bahwa pelaporan dana pendidikan tidak hanya merupakan kewajiban administratif, tetapi juga sarana membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Sekolah yang terbuka dalam melaporkan penggunaan dananya akan lebih dipercaya dan mendapat dukungan dari warga sekolah.

Namun demikian, pelaksanaan sistem digital juga memiliki beberapa kendala. Di antaranya adalah keterbatasan kemampuan teknis pengguna baru dalam mengoperasikan ARKAS dan SIPLah, serta keterlambatan sinkronisasi data akibat jaringan internet yang tidak stabil. Berdasarkan wawancara, bendahara SDN Sungai Miai 10 mengungkapkan bahwa pada awal penerapan sistem, beberapa data transaksi perlu di input ulang karena kesalahan format. Akan tetapi, seiring dengan pelatihan yang diberikan oleh dinas pendidikan, kemampuan pengguna meningkat dan kendala teknis dapat diatasi.

Secara keseluruhan, penerapan proses pencatatan dan pelaporan keuangan di SDN Sungai Miai 10 menunjukkan adanya kesesuaian antara kebijakan nasional dan praktik di lapangan. Sekolah telah berhasil menerapkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan sistem yang terintegrasi, kegiatan pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lebih tertib, cepat, dan mudah diaudit, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola keuangan sekolah yang profesional.

#### B. Jenis Administrasi dan Dokumen Keuangan Sekolah

Administrasi keuangan sekolah merupakan komponen penting dalam pengelolaan dana pendidikan, karena berfungsi sebagai alat pencatatan, pengawasan, dan

---

<sup>9</sup> Istiqomah and Abidin, "Evaluation of BOS Fund Accountability for Good Governance in Schools."

pertanggungjawaban seluruh kegiatan keuangan di lingkungan sekolah. Administrasi ini melibatkan berbagai jenis dokumen yang menjadi bukti sah atas setiap penerimaan dan pengeluaran dana, baik yang bersumber dari pemerintah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maupun dari sumber lainnya seperti komite sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SDN Sungai Miai 10, pengelolaan administrasi keuangan telah berjalan dengan cukup baik dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Sekolah ini menggunakan sistem digital berupa Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) serta Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) untuk mencatat dan melaporkan transaksi keuangan secara daring. Dengan sistem tersebut, setiap transaksi dilakukan secara non-tunai melalui rekening sekolah, sehingga memperkuat transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dokumen yang dihasilkan dari setiap transaksi disimpan secara rapi baik dalam bentuk fisik maupun digital, dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dana.

Adapun jenis dokumen administrasi keuangan yang digunakan di SDN Sungai Miai 10 meliputi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) sebagai pedoman utama dalam pengelolaan keuangan selama satu tahun anggaran. RKAS berfungsi sebagai dokumen perencanaan yang memuat rincian kegiatan serta alokasi anggaran yang akan digunakan. Selanjutnya terdapat bukti penerimaan dana, yang menunjukkan jumlah dana yang diterima sekolah dari pemerintah atau pihak lain, biasanya berupa slip transfer bank atau kuitansi penerimaan.

Selain itu, terdapat pula bukti pengeluaran dana, seperti nota pembelian, kuitansi, faktur, dan slip transfer, yang berfungsi sebagai bukti bahwa dana telah digunakan sesuai dengan rencana kegiatan. Untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi, sekolah menyusun laporan realisasi anggaran yang menunjukkan jumlah dana yang telah digunakan dibandingkan dengan anggaran yang telah direncanakan dalam RKAS. Dokumen ini juga dilampirkan bersama berita acara penggunaan dana yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif.

Selain dokumen utama tersebut, sekolah juga menyimpan dokumen pendukung seperti daftar inventaris barang, dokumen pengadaan barang dan jasa melalui SIPLah, surat perintah kerja, dan laporan hasil pemeriksaan atau audit internal. Semua dokumen tersebut menjadi bukti fisik dan digital yang saling berkaitan, membentuk sistem administrasi keuangan yang lengkap dan transparan. Sebagai bentuk keterbukaan publik, sekolah juga mempublikasikan

ringkasan laporan keuangan pada papan pengumuman sekolah agar dapat diakses oleh guru, orang tua, dan masyarakat.

Temuan di lapangan ini sejalan dengan penelitian oleh <sup>10</sup> dalam Jurnal Masharif al-Syariah yang menjelaskan bahwa administrasi keuangan sekolah mencakup proses perencanaan anggaran melalui penyusunan RKAS, pelaksanaan kegiatan sesuai rencana, pencatatan transaksi keuangan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban (LPJ) secara berkala (Sulastri & Nuraeni, 2024). Dalam konteks tersebut, dokumen-dokumen seperti RKAS, bukti transaksi, laporan realisasi, dan laporan pertanggungjawaban merupakan unsur utama administrasi keuangan sekolah.

Selanjutnya, penelitian oleh <sup>11</sup> menegaskan bahwa pengelolaan keuangan sekolah yang baik harus didukung dengan dokumentasi yang tertib dan sistematis, karena dokumen-dokumen tersebut menjadi dasar audit dan kontrol keuangan yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Mereka juga menekankan pentingnya literasi keuangan bagi bendahara dan kepala sekolah agar mampu mengelola dokumen keuangan secara tepat dan akurat <sup>12</sup>.

Hal serupa juga disampaikan oleh <sup>13</sup> dalam jurnal JSTAF, yang menjelaskan bahwa setiap sekolah wajib memiliki bukti fisik atas transaksi keuangan, seperti nota, kuitansi, dan faktur, serta menyusun laporan triwulan atau semesteran yang disahkan oleh kepala sekolah. Ia menambahkan bahwa pelaporan keuangan berbasis digital menjadi tren positif dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di lembaga pendidikan <sup>14</sup>.

Berdasarkan hasil analisis antara temuan lapangan dan teori, dapat disimpulkan bahwa administrasi keuangan di SDN Sungai Miai 10 telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam berbagai literatur. Sekolah telah memiliki dokumen-dokumen utama yang lengkap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Sistem digital seperti ARKAS dan SIPLah juga mendukung integrasi antara dokumen fisik dan digital

---

<sup>10</sup> Shayshay Salma Salsabila et al., "Analisis Pengelolaan Cigitung Kabupaten Bandung" 9, no. 204 (2024): 1049–58.

<sup>11</sup> Hastuti and Fitriani, "Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Melalui Literasi Keuangan Di SD Negeri Tanak Embang."

<sup>12</sup> Hastuti and Fitriani.

<sup>13</sup> Risa Umami and Ilham Fauzi, "Implementasi Administrasi Keuangan Dalam Pengalokasian Dana Pendidikan Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bakti Karya Parigi," *J-STAF: Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah* 2, no. 1 (2023): 105–19, <https://doi.org/10.62515/staf.v2i1.171>.

<sup>14</sup> Umami and Fauzi.

sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya kesalahan pencatatan atau manipulasi data. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar seluruh pengelola keuangan mampu memahami prosedur administrasi secara menyeluruh dan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berubah.

Secara keseluruhan, keberadaan administrasi dan dokumen keuangan di sekolah bukan hanya sebagai bukti formal kegiatan keuangan, melainkan juga sebagai alat manajerial untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikelola benar-benar dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Administrasi keuangan yang tertib dan transparan merupakan wujud nyata tanggung jawab sekolah terhadap publik dan pemerintah, serta menjadi dasar penting bagi tercapainya tata kelola pendidikan yang baik (*good school governance*).

### C. Prosedur Pengeluaran dan Alokasi Dana Sekolah

Prosedur pengeluaran dan alokasi dana di sekolah merupakan salah satu komponen utama dalam pengelolaan keuangan yang menjamin agar penggunaan dana sesuai dengan rencana kegiatan serta prinsip efisiensi dan akuntabilitas publik. Proses ini biasanya diawali dengan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang memuat rincian kebutuhan dan prioritas pendanaan dalam satu tahun ajaran. Menurut Siddiq et al. (2024) RKAS berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur aliran dana, baik yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun Dana Penunjang Pendidikan (DPP), agar penggunaannya terarah dan dapat dipertanggungjawabkan<sup>15</sup>.

Tahapan berikutnya adalah verifikasi dan persetujuan rencana pengeluaran oleh kepala sekolah serta bendahara, sebelum dana dapat dicairkan. Proses pencairan ini wajib mengikuti prinsip non-tunai sesuai regulasi Kementerian Pendidikan, guna meminimalkan potensi penyimpangan dana. Fatimah et al. (2024) menjelaskan bahwa setiap transaksi keuangan di SD Negeri 19 Kampung Olo dilengkapi dengan bukti dokumen seperti nota, kuitansi, dan bukti transfer, serta dilaporkan secara berkala kepada pihak terkait. Hal ini menunjukkan bahwa sistem administrasi keuangan sekolah telah mengadopsi praktik transparansi dan akuntabilitas publik yang baik

---

<sup>15</sup> Alwi Rofiudin Siddiq, Risma Nurmilah, and Irfan Sophan Himawan, "Analisis Penerapan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Keuangan Sekolah," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 4 (2024): 2043–58, <https://doi.org/10.56672/svqwtj29>.

Dalam konteks alokasi dana, sekolah harus menyesuaikan pembagian anggaran dengan kebutuhan strategis, seperti pembayaran honor guru, pemeliharaan sarana prasarana, serta kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler. Penelitian Hidayat et al. (2019) menemukan bahwa sekolah dengan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana BOS menunjukkan peningkatan efektivitas dalam penyediaan fasilitas belajar. Ini membuktikan bahwa perencanaan dan pelaksanaan alokasi dana yang baik memiliki dampak langsung terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan <sup>16</sup>.

Selain itu, evaluasi dan pelaporan realisasi anggaran menjadi tahap penting dalam menilai efisiensi penggunaan dana. Evaluasi dilakukan melalui audit internal sekolah, rapat komite, serta pelaporan ke dinas pendidikan secara periodik. menegaskan bahwa keberhasilan pengelolaan dana tidak hanya bergantung pada pencatatan yang rapi, tetapi juga pada keterbukaan informasi dan partisipasi aktif seluruh warga sekolah dalam proses pengawasan keuangan. Dengan prosedur yang terencana, transparan, dan terukur, sekolah dapat memastikan bahwa setiap pengeluaran benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pendidikan <sup>17</sup>.

#### D. Koordinasi dan Komunikasi Pengelolaan Keuangan Sekolah

Dalam manajemen keuangan sekolah, koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan (kepala sekolah, bendahara, guru, komite sekolah, orang tua, serta dinas pendidikan) sangat krusial agar setiap keputusan, alokasi, dan pelaporan dana dapat berjalan dengan lancar dan tidak terjadi miskomunikasi yang berpotensi menimbulkan kesalahan atau konflik. Praktik koordinasi dan komunikasi yang baik mendukung akurasi pengelolaan anggaran, keterbukaan, dan keterlibatan stakeholder dalam pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara di SDN Sungai Miai 10, koordinasi terkait anggaran dan penggunaan dana rutin dilaksanakan melalui rapat berkala antara kepala sekolah, bendahara, dan komite sekolah. Komunikasi mengenai perubahan anggaran, realisasi penggunaan dana, dan kendala teknis sistem ARKAS/SIPLah disampaikan dalam forum rapat tersebut, serta melalui pengumuman di papan informasi sekolah agar guru dan orang tua dapat mengetahui

---

<sup>16</sup> Rahmad Hidayat, M. Rahmatul Burhan, and Al Ma'ruf Al Ma'ruf, "Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Studi Di SDN 44 Mande Kota Bima)," *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 7, no. 2 (2019): 93, <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i2.1269>.

<sup>17</sup> Siddiq, Nurmilah, and Himawan, "Analisis Penerapan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Keuangan Sekolah."

status keuangan sekolah. Dengan model komunikasi seperti ini, pihak sekolah memastikan bahwa setiap langkah pengelolaan dana tidak berjalan secara tersendiri, melainkan dalam sinergi antar elemen sekolah.

Literatur terkini mendukung bahwa koordinasi dan komunikasi dalam pengelolaan sekolah memiliki peran strategis dalam efektivitas manajemen. Lestari et al. (2024) dalam Analisis Dinamika Koordinasi, Komunikasi, dan Supervisi dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) menyoroti bahwa sekolah yang berhasil menerapkan MBS menunjukkan koordinasi rutin antar manajemen sekolah dan personel sekolah, komunikasi informasi keuangan yang terstruktur, dan supervisi yang memberikan umpan balik konstruktif. Dalam penelitian tersebut, hubungan antar pihak sekolah berjalan lancar meskipun terdapat beberapa tantangan teknis dan koordinasi lintas bidang<sup>18</sup>.

Selanjutnya, studi “Implementasi Fungsi Manajemen Keuangan Sekolah” oleh Ferry Andika Eminarni et al. (2025) menunjukkan bahwa fungsi manajemen keuangan yang efektif tidak hanya terdiri dari aspek perencanaan dan pengendalian, tetapi juga membutuhkan koordinasi dan komunikasi yang baik antar unit sekolah untuk menciptakan integrasi antar fungsi keuangan. Mereka menegaskan bahwa penganggaran harus memperhitungkan unsur koordinasi dan komunikasi sebagai bagian dari mekanisme alokasi sumber daya<sup>19</sup>.

Dalam konteks Indonesia secara umum, Ningsih (2025) dalam penelitian tentang sistem pengelolaan keuangan pendidikan menyebutkan bahwa tantangan koordinasi dan komunikasi sering muncul karena keterbatasan kapasitas SDM dan infrastruktur teknologi. Mereka menganjurkan agar sekolah menetapkan protokol komunikasi yang jelas dan sistem informasi yang mendukung agar data keuangan dapat diakses dan dikomunikasikan oleh semua pihak terkait<sup>20</sup>.

Apabila kita hubungkan dengan praktik di SDN Sungai Miai 10, koordinasi dan komunikasi yang terjadi mencerminkan teori-teori di atas: rapat berkala sebagai forum koordinasi, pengumuman laporan keuangan sebagai media komunikasi publik, dan

---

<sup>18</sup> Anggun Riski Lestari et al., “Analisis Dinamika Koordinasi, Komunikasi, Dan Supervisi Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Daerah Pesisir,” *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 4, no. 4 (2024): 1733–45, <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.902>.

<sup>19</sup> Ferry Andika Eminarni et al., “Implementasi Fungsi Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan,” *Janacitta* 8, no. 1 (2025): 1–11, <https://doi.org/10.35473/janacitta.v8i1.3626>.

<sup>20</sup> Nelly Rahmawati Ningsih et al., “Analysis of Funding Sources for PPDB Activities in Budget Management at Public Schools” 4 (2025): 338–46, <https://doi.org/10.46843/jpm.v4i2.444>.

keterlibatan komite serta orang tua sebagai stakeholder dalam dialog keuangan sekolah. Kendala yang dilaporkan seperti keterlambatan sinkronisasi data atau kesulitan teknis ARKAS/SIPLah menunjukkan bahwa komunikasi teknis internal masih perlu diperkuat agar setiap masalah dapat segera dikomunikasikan dan diselesaikan bersama.

Untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi keuangan sekolah, beberapa langkah strategis yang bisa ditempuh antara lain: menetapkan jadwal rapat tetap (misalnya triwulan), menyusun protokol komunikasi (siapa melapor ke siapa, media apa yang digunakan), menyediakan ringkasan laporan keuangan yang mudah dipahami oleh non-keuangan (guru, orang tua), serta pemanfaatan sistem teknologi (misalnya dashboard internal, aplikasi chat kelompok) agar komunikasi keuangan berjalan real time dan transparan.

Dengan demikian, koordinasi dan komunikasi pengelolaan keuangan yang baik akan memperkuat sinergi antar pihak sekolah, meminimalkan miskomunikasi, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana sekolah secara keseluruhan.

#### E. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam pengelolaan dana publik, termasuk dana sekolah, untuk memastikan bahwa penggunaan dana dapat diwujudkan dengan kejelasan informasi kepada pemangku kepentingan dan pertanggungjawaban yang jelas terhadap tindakan pengelola. Di SDN Sungai Miai 10, praktik pengelolaan keuangan telah diarahkan untuk memenuhi prinsip tersebut melalui publikasi laporan realisasi dana pada papan informasi sekolah, penggunaan sistem digital (ARKAS / SIPLah) untuk akses data, dan laporan berkala ke pihak Dinas Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi.

Menurut Simanjuntak et al. (2024) dalam penelitian Studi Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana BOS, sekolah-sekolah telah melakukan sejumlah upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, seperti menyusun laporan keuangan, membuka akses informasi kepada publik, dan menerapkan mekanisme pengawasan internal yang efektif. Meski demikian, masih terdapat kekurangan dalam pengawasan dan peningkatan kapasitas manajemen keuangan di sekolah <sup>21</sup>.

---

<sup>21</sup> Melissa Nathania Simanjuntak, Dewi Amaliah Nafiati, and Neni Hendaryati, "Menuju Pendidikan Berintegritas: Studi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana BOS," *Journal of Education Research* 5, no. 4 (2024): 6191–97, <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1588>.

Jika kita kaitkan dengan praktik di SDN Sungai Miai 10, publikasi laporan keuangan pada papan informasi dan penggunaan ARKAS / SIPLah mendukung aspek transparansi yang dimunculkan dalam literatur. Namun, tantangan teknis (misalnya sinkronisasi data, akses sistem bagi semua pihak) serta kapasitas sumber daya manusia mungkin menjadi hambatan dalam mewujudkan akuntabilitas penuh seperti yang juga menjadi catatan dalam penelitian di daerah terpencil.

Untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, sekolah dapat mengambil langkah-langkah:

1. Menyajikan laporan realisasi dana secara terbuka (online maupun offline) yang mencakup alokasi, realisasi, dan sisa anggaran.
2. Memastikan bahwa komite sekolah dan masyarakat dapat mengakses dan memverifikasi laporan keuangan.
3. Melaksanakan audit internal dan eksternal secara berkala serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada semua pihak.
4. Memberikan pelatihan kepada bendahara dan pengelola agar memahami standar pelaporan keuangan dan teknis sistem digital.
5. Menggunakan sistem teknologi informasi yang aman dan mudah diakses, agar laporan keuangan dapat diperbarui secara real time dan transparan.

Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya menjadi slogan administratif, melainkan praktik nyata yang memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana sekolah, sekaligus memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pendidikan dan keberlanjutan program. Proses pencatatan dan pelaporan keuangan, administrasi dan dokumen keuangan sekolah, prosedur pengeluaran dan alokasi dana, koordinasi dan komunikasi pengelolaan keuangan, dan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana, semua ini merupakan sub tema yang ada pada pedoman wawancara kami.

## **SIMPULAN**

Pelaksanaan pengelolaan dan administrasi keuangan di SDN Sungai Miai 10 pada umumnya berjalan dengan baik, diiringi profesionalisme dan tingkat integritas yang tinggi. Ini terlihat dari peralihan sepenuhnya ke sistem digital, di mana semua langkah mulai dari perencanaan anggaran (RKAS), pencatatan, sampai pelaporan dikerjakan menggunakan Aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) serta Sistem Informasi Pengadaan

Sekolah (SIPLah). Manajemen dana menunjukkan akuntabilitas dan transparansi yang ketat, karena semua transaksi bersifat non-tunai, disetujui melalui mekanisme otorisasi dari Kepala Sekolah (Approver), dan ringkasan anggaran diumumkan di papan pengumuman. Namun, sekolah menghadapi tantangan besar dari regulasi eksternal, terutama dalam menyesuaikan diri dengan batasan persentase alokasi untuk honorarium guru non-ASN serta regulasi yang membatasi biaya minimal untuk perbaikan sarana dan prasarana. Batasan ini berdampak pada ketidakcocokan antara sistem administrasi yang baik dan kondisi fisik dari fasilitas dasar, di mana siswa masih merasakan kurangnya beberapa alat dasar tertentu dan adanya kebutuhan untuk sumbangan sukarela demi mengganti alat kebersihan minor.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis pertama-tama berterimakasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan karunia dan keberkahan dari-Nya kegiatan ini berjalan dengan lancar mulai dari melaksanakan observasi sampai penulisan artikel ini, tidak lupa pula penulis berterimakasih dengan teman-teman sejawat, sekelompok, dan seperantaran, karena mereka artikel ini dapat tertulis dengan rapi dan sistematis dengan data yang sudah cukup lengkap, ucapan terimakasih juga penulis ucapkan kepada narasumber yang sudah berkenan untuk membantu kami dalam pembuatan artikel ini.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh warga SDN Sungai Miai 10 karena dengan fasilitas, narasumber, serta data yang diberikan sangat-sangat membantu kami dalam terlaksananya penulisan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Farida, Nurul, and Mulyaningtyas. "Implementation of Accounting Information Systems and Accountability of Regular School Operational Assistance." *Jurnal PETA* 9, no. 1 (2024): 55–67. <https://journal.stieken.ac.id/index.php/peta/article/view/748/748>.
- Ferry Andika Eminarni, Windah Lestari, Eni Prasetyaningrum, and Nurkolis. "Implementasi Fungsi Manajemen Keuangan Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan." *Janacitta* 8, no. 1 (2025): 1–11. <https://doi.org/10.35473/janacitta.v8i1.3626>.
- Hanifah, A, A Munawaroh, N Husainah, S Jamilah, S Hartinah, S H Harun, M Annas, and A M Tsabit. *Pengantar Ilmu Statistik*. Duta Sains Indonesia, 2025.
- Hasibuan, Syahrial, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalhah, Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, and Andi Aris Mattunruang S E. *Media Penelitian Kualitatif*. *Jurnal EQUILIBRIUM*. Vol. 5, 2022.

- Hastuti, Sri Puji, and Mohamad Iwan Fitriani. "Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Melalui Literasi Keuangan Di SD Negeri Tanak Embang." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 9, no. 3 (2024): 2145–53. <https://doi.org/10.29303/jipp.v9i3.2423>.
- Hidayat, Rahmad, M. Rahmatul Burhan, and Al Ma'ruf Al Ma'ruf. "Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikan (Studi Di SDN 44 Mande Kota Bima)." *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)* 7, no. 2 (2019): 93. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i2.1269>.
- Istiqomah, Nur, and Fityan Izza Noor Abidin. "Evaluation of BOS Fund Accountability for Good Governance in Schools." *Inquest Journal* 2, no. 2 (2025): 15–34. <https://doi.org/10.53622/ij.v2i2.343>.
- Lestari, Anggun Riski, Fhatia Khoiroh, Hendri Marhadi, Erlisnawati Erlisnawati, and M. Nur Mustafa. "Analisis Dinamika Koordinasi, Komunikasi, Dan Supervisi Dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) Di Daerah Pesisir." *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)* 4, no. 4 (2024): 1733–45. <https://doi.org/10.53299/jppi.v4i4.902>.
- Ningsih, Nelly Rahmawati, Asep Rahmat Kurnia, Syafitri Ningsih, and Yudi Kirmadi. "Analysis of Funding Sources for PPDB Activities in Budget Management at Public Schools" 4 (2025): 338–46. <https://doi.org/10.46843/jpm.v4i2.444>.
- Salsabila, Shayshay Salma, Bambang Handoko, Universitas Teknologi, Digital Bandung, and Rangkap Jabatan. "Analisis Pengelolaan Cigitung Kabupaten Bandung" 9, no. 204 (2024): 1049–58.
- Santosa, Sedy, Andi Mihrajuddin, and Erni Munastiwi. "The Implementation of School Financial Management System in Managing the BOS Fund." *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 12, no. 2 (2022): 145–55. <https://doi.org/10.24042/alidarah.v12i2.10905>.
- Siddiq, Alwi Rofiudin, Risma Nurmilah, and Irfan Sophan Himawan. "Analisis Penerapan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dan Dana Penunjang Pendidikan (DPP) Dalam Upaya Meningkatkan Kinerja Keuangan Sekolah." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal* 3, no. 4 (2024): 2043–58. <https://doi.org/10.56672/svqwtj29>.
- Simanjuntak, Melissa Nathania, Dewi Amaliah Nafiati, and Neni Hendaryati. "Menuju Pendidikan Berintegritas: Studi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Dana BOS." *Journal of Education Research* 5, no. 4 (2024): 6191–97. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.1588>.
- Umami, Risa, and Ilham Fauzi. "Implementasi Administrasi Keuangan Dalam Pengalokasian Dana Pendidikan Di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bakti Karya Parigi." *J-STAF: Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah* 2, no. 1 (2023): 105–19. <https://doi.org/10.62515/staf.v2i1.171>.